

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI MELALUI MATA
PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 6 TAKALAR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

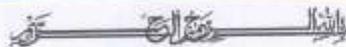
OLEH

NURCAHYA ANA S

10543 0086 14

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn di
SMA Negeri 6 Takalar

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nurehya Ana S
Stambuk : 10543000014
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan dirinci maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan

Makassar, April 2019

Disetujui oleh

Pembimbing I

Dr. Andi Sugarti

Pembimbing II

Dra. Sumiati Nur., M.Pd.

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Mahyar, M.Pd.
NBM. 988 461





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Nurcahya Ana.S**, NIM 10543008614 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada Tanggal 14 Sya'ban 1440 H/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019

Makassar, 18 Sya'ban 1440 H
24 April 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Roslenny Babo, M.Si. (.....)
2. Dra. Jumiati Nur, M.Pd. (.....)
3. Auliah Andika Rukman, SH,.MH. (.....)
4. Dr. Muhajir, M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM : 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran
PPKn di SMA Negeri 6 Takalar

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama Mahasiswa : Nurcahya Ana S
NIM : 10543 0086 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Setelah diperiksa dan diteliti, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diujikan.

Makassar, *April 2019*

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Sugiati M.Pd.

Dra. Jumiati Nur., M.Pd.

Diketahui:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
PPKn

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D
NBM : 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd
NBM : 988 461



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurcahya Ana S

NIM : 10543 0086 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran
PPKn di SMA Negeri 6 Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2018

Yang Membuat Pernyataan

Nurcahya Ana S



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurcahya Ana S

NIM : 10543 0086 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, September 2018
Yang Membuat Perjanjian

Nurcahya Ana S

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Man Jadda Wa Jadda”

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

“Maka bersabarlah”

“Karena sesungguhnya, Sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesudah kesulitan ada kemudahan”

(QS AL-INSYIRAH: 5-6)

Persembahan :

Karya kecilku ini ku persembahkan sebagai wujud kasih sayang dan terima kasihku kepada :

1. Ayahandaku Kamaruddin dan Ibundaku Marhasni atas doa, motivasi, dukungan dan inspirasi yang tcurahkan untukku.
2. Nurul Fajri yang selalu memotivasi dan menjadi penyemangatku.
3. Keluarga, saudara, sahabat serta teman-teman seperjuangan PPKn 2014 yang telah banyak memberi bantuan.
4. Almamater yang aku banggakan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

ABSTRAK

Nurcahya Ana S. 2018. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Andi Sugiati dan Pembimbing II Jumiati Nur.

Nilai-nilai maupun prinsip demokrasi harus ditanamkan pada setiap generasi. Namun kenyataannya, dunia pendidikanlah yang paling banyak memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, Pendidikan demokrasi harus diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Salah satunya adalah mata pelajaran PPKn. Masalah utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui implementasi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar, dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Takalar. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X, XI dan XII SMA Negeri 6 Takalar. Sampel penelitian ini yaitu kelas X MIPA 1. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar sudah terimplementasikan dengan baik dengan nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan yaitu nilai kebebasan, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, dan kebebasan berpartisipasi yang dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, Dan penugasan, (2) Faktor pendukung pada implementasi pendidikan demokrasi yaitu sarana dan Prasarana LCD, Laptop, LKS dan beberapa buku referensi pendukung, Kegiatan ekstrakurikuler yaitu OSIS, PMR dan Pramuka serta Keteladanan Guru, dan (3) Faktor penghambat pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar yaitu Perbedaan individual siswa.

Kata kunci: *Nilai-Nilai Demokrasi, Mata Pelajaran PPKn*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar*", sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati, Sosok pemimpin yang terpercaya, jujur, dan berakhlak karimah yang telah bersusah payah mengeluarkan manusia dari kungkungan kebiadaban, sehingga sampai saat ini manusia mampu memposisikan diri sebagai warga negara yang senantiasa beriman dan bertaqwa di jalan Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis, skripsi ini lahir dan tampil sebagai manifestasi dari suatu usaha yang tak mengenal lelah dan pantang menyerah. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa mulai dari penyusunan, hingga selesai skripsi ini ditulis, tidak sedikit hambatan dan tantangan yang dialami penulis. Namun, hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, tidak berlebihan kalau sekiranya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Segenap dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atas segala ilmu dan bimbingannya.

2. Bapak Ilham S.Pd.,M.Pd, selaku Kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar yang dengan baik hati telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 6 Takalar.
3. Segenap guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 6 Takalar atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini.
4. Siswa siswi SMA Negeri 6 Takalar yang ikut berpartisipasi dan telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Teristimewa Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahandaku Kamaruddin dan Ibundaku Marhasni atas segala doa dan dukungan tak terhingga yang selalu tercurah untuk keberhasilan ananda.
6. Nurul Fajri yang selalu setia menemani, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Alya Ulfa Deviyanti dan teman-teman seperjuanganku khususnya teman kelas PPKn B Angkatan 2014 yang selalu memberi motivasi, dukungan dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang telah ikut serta memberikan bantuannya, yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal ibadah dan bantuan yang diberikan dengan tulus ikhlas serta limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa tercurah kepada kita. Amin .

Sebagai seseorang yang masih dalam taraf belajar, tentu saja skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna perbaikan dan

peningkatan kualitas penulis dimasa yang akan datang, karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, 1 September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Pengertian Nilai	6
2. Pengertian Demokrasi	8
3. Nilai-Nilai Demokrasi	11

4. Mata Pelajaran PPKn	19
5. Hasil Penelitian Yang Relevan	32
B. Kerangka Pikir	39
C. Definisi Operasional Variabel	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Sumber Data	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar	48
2. Faktor Pendukung Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar	55
3. Faktor Penghambat Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar	58
B. Pembahasan	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Tabel Populasi	43
3.2. Tabel Sampel	44



DAFTAR GAMBAR

Bagan	Halaman
2.1. Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Instrumen Penelitian Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara dan Biodata Informan
- Lampiran 3. Instrumen Penelitian Lembar Observasi
- Lampiran 4. Data Hasil Observasi
- Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 6. Lembar Konsultasi Bimbingan Proposal
- Lampiran 7. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Lembar Pengesahan Proposal
- Lampiran 9. Berita Acara Ujian Proposal
- Lampiran 10. Surat Keterangan Perbaikan Hasil Ujian Proposal
- Lampiran 11. Surat Izin Penelitian dari Penanaman Modal Makassar
- Lampiran 12. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel
- Lampiran 13. Surat Keterangan Telah Meneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang demokratis merupakan suatu yang ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat demokratis adalah kehidupan bersama dimana setiap warganya tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial memiliki hak yang sama sebagai makhluk yang bermartabat. Setiap individu sebagai anggota masyarakat memiliki hak-hak yang harus dihargai, tanpa melupakan kewajiban-kewajibannya.

Pancasila sebagai landasan ideologi negara terafiliasi dengan pelaksanaan kehidupan demokrasi sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Darmodiharjo dalam Sunarso dkk (2008: 80), bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara demokrasi mengupayakan perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kultur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Carter dan Herz dalam Miriam Budiarjo (1980: 86-87), menyatakan bahwa kultur kehidupan demokratis terlihat dari adanya pemerintahan yang mampu menjamin hak-hak individu secara konstitusional, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, serta kebebasan untuk berserikat.

Indonesia sebagai negara yang demokratis memiliki beberapa permasalahan terkait pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Beberapa pelanggaran

yang terjadi diantaranya pada pelaksanaan Pemilu. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti politik uang, kebocoran hak suara, kampanye hitam, penggelapan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap), hingga panitia penyelenggara Pemilu yang kurang profesional.

Pendidikan memegang peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai dan cita-cita demokrasi bagi generasi muda kita. Sekolah dalam hal ini sebagai penyelenggara pendidikan harus mampu menyelenggarakan pendidikan demokrasi. Sikap dan mental demokrasi harus ditanamkan dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan. Nilai-nilai maupun prinsip demokrasi harus ditanamkan pada setiap generasi.

Namun kenyataannya, dunia pendidikanlah yang paling banyak memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Beberapa permasalahan diantaranya fenomena guru otoriter, diskriminasi sosial, perkelahian antar pelajar, dan bullying di antara para siswa. Beberapa guru masih mempraktikkan cara mengajar yang otoriter. Paul Suparno menyatakan bahwa masih banyak guru tidak dapat menerima gagasan siswa yang berlainan dengan yang mereka ajarkan, siswa banyak dikekang kebebasan berpikirnya dan bahkan dimatikan kreativitasnya (Tonny D. Widiastono, 2004: 128).

Oleh karena itu, Pendidikan demokrasi harus diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Salah satunya adalah mata pelajaran PPKn. Pendidikan demokrasi sangat tepat jika diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn. PPKn sebagai mata pelajaran pendidikan moral

merupakan suatu usaha membimbing perkembangan kepribadian peserta didik yang berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu, pendidikan PPkn di setiap lembaga pendidikan harus tetap dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembelajaran Kewarganegaraan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada umumnya proses pembelajaran PPkn yang dilaksanakan yaitu melalui pembelajaran satu arah, yaitu ceramah, siswa tidak diajak untuk turut aktif, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik, karena siswa tidak memiliki tantangan dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Proses pembelajaran demikian ini menyebabkan proses pembentukan suasana demokrasi di sekolah dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi gagal, karena siswa tidak distimulus untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Kegiatan observasi awal yang dilakukan sebelum penelitian dimulai menunjukkan bahwa di SMA Negeri 6 Takalar nilai-nilai demokrasi masih belum diimplementasikan secara maksimal. Banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami arti pentingnya nilai-nilai demokrasi, terutama bagi para siswa yang berada pada jenjang awal terutama kelas-kelas non unggulan. Siswa juga belum terbiasa menjalankan nilai-nilai demokrasi yang telah ditetapkan dan masih terbawa oleh kebiasaan atau perilaku mereka pada jenjang sekolah sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar ?
2. Apakah faktor pendukung pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar ?
3. Apakah faktor penghambat pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mencapai beberapa manfaat.

Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang yang mengkaji tentang implementasi nilai-nilai demokrasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini di harapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada guru mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PPKn.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi sekolah dalam menanamkan, membina, mensosialisasikan prinsip, ide dan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik.

c. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa/siswi SMA Negeri 6 Takalar yaitu tau apa itu demokrasi dan terbiasa hidup berdemokrasi.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bekal saat mengajar nanti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Nilai

Menurut Seokanto (1980: 45) nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

Nilai diartikan sebagai berikut : (1) Harga dalam arti takaran, misalnya nilai intan; (2) Harga sesuatu, misalnya uang; (3) Angka kepandaian; (4) Kadar, mutu; (5) Sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai agama (Soegito, dkk: 75-76).

Nilai tidak hanya tampak pada sebagai nilai bagi seseorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai suatu yang patut dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai merupakan suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat di indera, hal yang dapat diamati hanyalah obyek yang bernilai itu. Misalnya, orang

yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak dapat mengindra kejujuran itu.

2) Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap untuk mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.

3) Nilai berfungsi sebagai motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

<https://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai-html>

Dalam filsafat nilai dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Nilai logika adalah nilai benar salah
- 2) Nilai estetika adalah nilai indah tidak indah.
- 3) Nilai etika moral adalah nilai baik buruk.

<https://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai-html>

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga atau berguna bagi kehidupan manusia dimana nilai tersebut merupakan suatu konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

2. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya paham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi *isme*, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab. (Haedar Nashir, 1999: 37)

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota

masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut : Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. (Azyumardi Azra, 2000: 110-111)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi berarti sebagai berikut :

- a. Bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi);
- b. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Dari akar kata di atas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu :

- 1) Lincoln (2003: 42-43), Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (demos: rakyat, dan cratein : memerintah). Maka secara harafiah, demokrasi berarti rakyat memerintah.
- 2) Tim Abdi Guru (2006: 130), Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat.

Menurut Harris Soche dalam buku yang berjudul "*paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*" (2017: 100). Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut C.F Strong dalam buku yang berjudul "*paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*" (2017: 101). Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Dan pendapat yang paling populer pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh

rakyat dan untuk rakyat (*goverenment of the people, by the people and for the people*).

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem atau bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat artinya rakyat pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan.

3. Nilai-Nilai Demokrasi

Yang dimaksud nilai adalah takaran, harga, banyak sedikitnya isi dan mutu (KBBI, 2005: 783). Demokrasi mempunyai arti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan pertamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (KBBI, 2005: 249). Jadi yang dimaksud nilai-nilai demokrasi adalah takaran, harga sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman dalam masyarakat, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, pemerintahan tersebut akan sulit ditegakkan. Nilai-nilai demokrasi antara lain sebagai berikut :

a. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokratis (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Dalam masa transisi menuju demokrasi saat ini, perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi seringkali menimbulkan persoalan bagi warga negara maupun masyarakat pada umumnya.

Hak untuk menyampaikan pendapat ini wajib dijamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur swasta. Semakin cepat dan efektif cara pemerintahan memberikan tanggapan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintahan tersebut. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 18)

Dalam rezim otoriter, kebebasan menyampaikan pendapat pada umumnya di batasi. Hanya pendapat-pendapat yang mendukung atau memuja rezim berkuasa saja yang diberi kesempatan untuk berkembang. Sebaiknya, pendapat yang miring atau bertolak belakang dengan garis kebijakan rezim di anggap sebagai ancaman bagi rezim yang berkuasa. Bila pendapat ini di salurkan melalui tulisan, buku,

produk seni, atau yang lain, maka pemerintah represif akan melarang peredaran atau perwujudan buku tersebut. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 18)

Di masa rezim orde baru, tindakan pemasangan kebebasan mengatakan oprasionalkan secara maksimal untuk memantau setiap pendapat yang muncul atau gerak-gerik tokoh. Para intelejen sangat represif yang terlalu sering melanggar hak asasi manusia untuk menindas kebebasan berpendapat tersebut. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 18)

Penindasan ini mengakibatkan matinya nilai-nilai demokrasi di RI. Dengan kematian ini, rezim Orde Baru dapat leluasa menentukan kebijakan negara sesuka hatinya. Namun dalam jangka panjang, akibatnya sangat parah. Kasus represi terhadap perbedaan pendapat namun sudah tentu berada dalam koridor yang memerlukan kesepakatan kolektif. Kebebasan menyatakan pendapat diperlukan karena dalam era keterbukaan ini perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat memerlukan tanggapan dan sikap dari warga negara sesuai haknya. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 18)

b. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga. Kebebasan berkelompok ini yang diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain.

Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Masyarakat primitif berkelompok dalam mencari makan dan perlindungan dari kejaran hewan liar maupun kelompok lain yang jahat. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 20)

Dalam era modern ini, kebutuhan berkelompok ini tumbuh semakin kuat. Persoalan yang muncul ditengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar. Ketika banjir melanda suatu daerah, upaya penyelamatan dan pemberian bantuan akan lebih cepat dilakukan secara berkelompok. (Dahl. 1971)

Kebebasan berkelompok dalam rezim Orde Baru dibatasi, misalnya, dengan melarang pembentukan partai selain apa yang disetujui oleh rezim pada waktu itu. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok, termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apapun. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warga negara. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 20)

c. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi ini sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Jenis yang pertama adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR maupun pemilihan presiden . bentuk partisipasi kedua yang belum berkembang luas di negara demokrasi

baru adalah apa yang disebut sebagai kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah.

Bagi masyarakat transisi seperti Indonesia, mengorganisasi diri untuk melakukan kritik terhadap pejabat semakin menjadi kebutuhan yang mendesak. Persoalan yang dihadapi masyarakat akan berkembang lebih cepat dari kemampuan eksekutif dan legislatif dalam menangani persoalan tersebut. Oleh karena itu, urgensi untuk mengembangkan budaya kontak langsung ini akan membantu masyarakat sendiri dalam mencari solusi atas persoalan kehidupan yang semakin kompleks.

Di samping itu, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, internet dll, maka kesempatan masyarakat untuk melakukan hubungan langsung dengan pejabat akan semakin besar. Oleh karena itu, kendala utamanya adalah pendidikan politik kepada masyarakat luas tentang manfaat jenis partisipasi ini, sehingga masyarakat mencapai tingkat kesadaran yang diperlukan. Meski demikian, karena model ini memerlukan kemampuan nego atau tawar-menawar.

Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah adalah bentuk partisipasi ketiga yang diperlukan negara demokrasi, agar sistem politik bekerja lebih baik. Bentuk yang keempat adalah mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan mulai dari

pemilihan lurah, bupati, walikota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden, sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku.

d. Kerjasama

Kerjasama untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam tubuh masyarakat. Akan tetapi, kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok.

Kerjasama tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka. Diperlukan kompetisi satu sama lain sebagai pendorong bagi kelompok untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Kerjasama diperlukan bagi kelompok-kelompok untuk menopang upaya persaingan dengan kelompok lain.

Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar individu dan antar kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi.

e. Kesetaraan Antar-Warga

Kesetaraan atau egalitarisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan disini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberikan tempat

bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi etnis. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 21)

Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Diperlukan usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi atas kelompok etnis, bahasa, daerah atau agama.

Kesetaraan sulit diharapkan dalam rezim otoriter seperti era Orde Baru. Dalam era repressif itu, tidak semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama.

f. Kedaulatan Rakyat

Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Warga negara sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan.

Dalam Orde Baru, para politisi boleh dikatakan tidak *accountability*. Mereka berbuat sesuka hati dalam bentuk menikmati semua fasilitas dan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Accountability tergolong ke dalam kelompok nilai-nilai demokrasi yang sulit dikembangkan. Dalam era ORBA, praktis para politisi bisa dikatakan tidak *accountable*. Mereka berbuat sesuka hati

dalam bentuk menikmati semua fasilitas dan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Kondisi rezim ini sangat bertolak belakang dengan kondisi rezim demokrasi. Dalam demokrasi, justru harus *accountability*, yakni melayani segala kebutuhan rakyat.

g. Rasa Percaya (*Trust*)

Rasa percaya antar kelompok masyarakat merupakan nilai dasar lain diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain tidak tumbuh. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 23)

Rasa percaya antar Kelompok masyarakat merupakan minyak pelumas untuk melancarkan relasi-relasi sosial politik yang ada dalam masyarakat yang sering terhalang oleh rasa ketakutan, kecurigaan, dan permusuhan yang berpotensi memendekkan proses demokrasi. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 23)

Pada masa Orde Baru, kepercayaan terhadap polisi sangatlah rendah. Rakyat, khususnya aktivis politik yang tidak mengikuti kemauan pemerintah untuk mendukung partai atau kebijakan pemerintah sering dibayangi rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap pejabat pemerintah khususnya aparat militer. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 23)

h. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan umum, karenanya semuanya memiliki kodrat yang sama. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial. Kontruksi sosial yang diskriminatif terhadap perempuan seringkali dilakukan atas nama tradisi dan agama. Kontruksi sosial seringkali memandang bahwa perempuan tidak boleh melebihi laki-laki. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 22)

Dalam demokrasi, kesetaraan gender harus diwujudkan. Proses ke arah itu memang memerlukan waktu yang panjang. Dalam proses politik, perkembangan ke arah kesetaraan gender dalam politik di era pasca-reformasi 1998. Namun, hal itu hanyalah sebagian kecil solusi dalam persoalan kesetaraan gender. Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan gender, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain. (Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014: 22)

4. Mata Pelajaran PPKn

Mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) baru dikenal pada kurikulum 1968. Ruang lingkup materinya mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics sebagai pengetahuan kewargaan Negara. Materi ini diperuntukan pada jenjang Sekolah Dasar. Materi yang ada pada jenjang SMP meliputi Sejarah Indonesia dan Tata Negara. Sedangkan pada

jenjang SMA materi PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945. Pada jenjang pendidikan SPG yang menggunakan kurikulum 1969, mata pelajaran PKN mencakup Sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia (HAM). (<https://guruppkn.com/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan-menurut-para-ahli/amp>)

Dalam perkembangannya di dalam kurikulum sekolah Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 ada mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan ada Pengetahuan Kewargaan Negara. Melalui kurikulum PPSP pada jenjang SD 8 tahun, diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial yang di dalamnya berisikan tentang materi ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah 4 tahun, diberikan mata pelajaran Studi Sosial Terpadu dan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Civics dan Hukum khusus bagi yang mengambil jurusan sosial.

Selama ini apabila dicermati ada dua wacana berbeda yang berkembang yang perlu mendapat penjelasan. Ada istilah kewarganegaraan dan kewarga negaraan. Soemantri (1967) mengatakan bahwa istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara, seperti misalnya tentang perolehan status dan kehilangan status warga Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 12 tahun 2011. Sementara istilah kewargaan Negara merupakan terjemahan dari istilah “Civics” yaitu

merupakan mata pelajaran ilmu sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga Negara yang baik (good citizen). Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu (keterampilan) melaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Atau dengan kata lain warga Negara yang baik adalah warga Negara yang tahu, sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. (<https://guruppkn.com/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan-menurut-para-ahli/amp>)

Secara historis pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewarganegaraan Negara (PKN) diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran PMP berisikan materi pokok Pancasila sebagaimana yang dijabarkan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang P-4. Pada saat itu mata pelajaran PMP menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan di tingkat SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Hal ini terus berlanjut dan tetap dipertahankan baik istilah maupun isi/materinya sampai berlakunya kurikulum 1984.

Keluarnya Undang Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berdampak pada perubahan kurikulum. Untuk mengakomodasi

perintah UU No. 2 tahun 1989 tersebut maka dikeluarkan kurikulum 1994, yang di dalamnya memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn).

Berbeda dengan kurikulum 1975 dan 1984, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasi materinya tidak atas dasar rumusan butir-butir nilai P-4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P-4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas (spiral of concep development). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. Sesuai dengan Garis Garis Besara Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR berdasarkan TAP No.II/MPR/1998 yang menentukan bahwa Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 45 kepada generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Pendidikan Pancasila memuat pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, serta pendidikan kejuangan.

Sejak berlakunya Undang Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang Undang No.2 tahun 1989, pasal 37 ayat (2) menetapkan kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dengan

demikian pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan secara sendiri, namun berubah namanya menjadi pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya berisikan pendidikan nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila. Adapun tujuan diberikannya Pendidikan kewarganegaraan adalah dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini seiring dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara substansif pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ada dalam undang undang SISDIKNAS dapat dipahami sebagai suatu mata pelajaran yang merupakan wahana pedagogis untuk mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotisme serta nilai kebajikan demokratis. Yang seringkali menjadi persoalan dalam mencapai tujuan tersebut adalah di dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diharapkan.

(<https://guruppkn.com/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan-menurut-para-ahli/amp>)

Dari uraian tersebut di atas kita dapat melihat cita-cita, konsep, nilai serta prinsip yang secara konseptual tersurat dan tersirat di dalam dokumen-dokumen resmi yang memuat pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia terkait pendidikan kewarganegaraan, secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk dan membimbing peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional ini dilakukan melalui mata pelajaran budi pekerti,
- b. Pada tahun 1950 keluar Undang Undang nomor 4 tahun 1950 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,
- c. Pada tahun 1954 keluar Undang undang nomor 12 tahun 1954 tentang DasarDasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang menggariskan bahwa tujuan pendidikan adalah
“...untuk melahirkan warga Negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan maknmur baik materiil maupun spiritual dan yang berjiwa Pancasila.....”,
- d. Pada tahun 1975/1976 dikeluarkan kurikulum 1975 yang menggariskan diberikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah. Visi dan misi diemban mata pelajaran PMP ini adalah nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,

- e. Pada tahun 1984 ada perkembangan baru di dalam ketatanegaraan di mana MPR mengeluarkan ketetapan NO. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prastya Pancakarsa. Dengan dikeluarnya ketetapan MPR tersebut, pemerintah melalui menteri Pendidikan mengakomodirnya dengan mengeluarkan kurikulum pendidikan 1984. Visi dan misi kurikulum 1984 sama dengan visi misi kurikulum 1975, hanya saja muatan materi pembelajarannya berbeda. Muatan materi pembelajaran pada kurikulum 1984 adalah butir-butir P-4 yang meliputi 36 butir,
- f. Pada tahun 1989 keluar Undang Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU No 2 tahun 1989 tersebut mengatur tentang kewajiban pada kurikulum yang ada di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan untuk memuat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian mata pelajaran PMP berubah nama menjadi pendidikan kewarganegaraan (PKn). Pada mapel PKn pembelajaran yang dilaksanakan dapat mengembangkan kebijaksanaan warganegara (civic virtue) dan pembudayaan/pembiasaan keterampilan (civic culture) didalam kehidupan sehari-hari secara demokrasi,
- g. Pada tahun 1994 keluar kurikulum baru yakni kurikulum 1994 di mana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagaimana kurikulum 1989 berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn). Pada kurikulum 1994 ini meskipun kajian PPKn sama dengan kajian kurikulum 1989, tetapi karakteristik kurikulumnya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum 1994 sangat kental dengan Pendidikan Moral Pancasila yang di dalamnya didominasi oleh suatu proses pengembangan nilai serta desiminasi pengetahuan. Hal ini berlanjut sampai saat ini walau dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

<https://gurupkn.com/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan-menurut-para-ahli/amp>

Dari perkembangan kurikulum sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat diperoleh gambaran dan kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diberikan dalam rangka membentuk karakter warga negara yang baik (*good Citizenship*). Karakter warga negara yang baik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *civic education* (Artinya, Ilmu Pengetahuan kewarganegaraan, hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasir, hubungan seseorang individu dengan Negara). Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif yang meliputi

demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikbud) No.22 Tahun 2006 mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Demi menjadi seorang warga negara yang berkarakter, memiliki kecerdasan, keterampilan, sebagai mana berdasar pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mata pelajaran dengan fokus pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Widiastono (2004: 25-26), Pendidikan Kewarganegaraan atau *civics* atau *civics education* adalah pendidikan atau pengajaran untuk mengembangkan kesadaran akan dirinya sebagai Warga Negara, dengan hak-hak dan berbagai tanggung jawabnya dalam diri peserta didik. Di Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan yang dikenal adalah pendidikan atau pengajaran “budi pekerti” yang menanamkan dalam peserta didik asas-asas moral, etika dan etiket yang melandasi sikap dan tingkah laku dalam pergaulan kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakatnya.

Menurut Depdikbud (1997: 6), Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Karakteristik mata pelajaran PPKn berbeda dengan disiplin ilmu lain. Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Hasan (2006: 47), pola pembelajaran mata pelajaran PPKn menekankan pada unsur pendidikan dan pembelajaran pada siswa. Penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada upaya menjelajahi siswa dengan sejumlah konsep yang bersifat hafalan belaka, melainkan terletak pada upaya agar siswa mampu menjadikan apa yang telah dipelajarinya sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam melakoni kehidupan masyarakat lingkungannya, serta berbagai bekal bagi dirinya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Menurut Priyanto (2005: 5), Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :

- a. Persatuan bangsa,
- b. Nilai dan norma,

- c. Hak asasi manusia (ham),
- d. Kebutuhan hidup,
- e. Kekuasaan dan politik,
- f. Masyarakat demokratis,
- g. Pancasila dan konstitusi negara, dan
- h. Globalisasi.

Menurut Priyanto (2005: 4), Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :

- a. Berpikir kritis terhadap isu Kewarganegaraan,
- b. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- c. Berkembang secara positif dan demokratis, dan
- d. Berinteraksi dengan bangsa lain.

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai wahana dalam membentuk warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan karakter warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan terampil sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

a. PPKn Menurut Kurikulum 2013 (K13)

PPKn menurut Kurikulum 2013 (K13) merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam kurikulum 2006.

Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan:

1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari kerusuhan ruang lingkup mata pelajaran PPKn.

2) Substansi dan jiwa UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari PPKn, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Ruang lingkup PPKn dalam Kurikulum 2013, antara lain sebagai berikut :

1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.

2) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 3) NKRI sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia.
- 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. PPKn Menurut KTSP

Pendidikan Kewarganegaraan dikenal *civic education* dalam konteks wacana pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis menurut konstitusi negaranya masing-masing. Sebagaimana berkembang di berbagai belahan dunia, tercatat adanya berbagai nomenklatur untuk itu, yakni: “*Citizenship education*” (UK), termasuk di dalamnya “*civic education*” (USA) atau disebut juga pendidikan kewarganegaraan (Indonesia), atau “*ta’limatul muwwatanah/at tarbiyatul alwatoniyah*” (Timur Tengah) atau “*educacion civicas*” (Mexico), atau “*Sachunterricht*” (Jerman) atau “*civics*” (Australia) atau “*social studies*” (New Zealand) atau “*Life Orientation*” (Afrika Selatan) atau “*People and society*” (Hungary), atau “*Civics and moral education*” (Singapore).

Kosasih djahiri, (2006: 9) Pendidikan kewarganegaraan (PKn) atau Civic Education adalah program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan (*Humanizing*) dan membudayakan (*Civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia dalam hal ini peserta didik (diri dan kehidupannya menjadi

warganegara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/ yuridis konstitusional bangsa/ Negara yang bersangkutan.

Dalam kurikulum 2006 (KTSP) materi keilmuan mata pelajaran Pkn mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skills*), dan nilai (*values*). Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran Pkn yang membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip PKN. Pada gilirannyawarga Negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis.

Ruang lingkup PPKn dalam KTSP adalah persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, peraturan, HAM, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan, politik, Pancasila, globalisasi.

5. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berti Damayanti (2016) dengan judul **“Implemetasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang Cilacap”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang didukung oleh kultur dan kurikulum sekolah. Sekolah mengadakan beberapa strategi dalam menciptakan kultur demokratis diantaranya mengadakan kebiasaan, kegiatan khas, dan peraturan sekolah yang berorientasi nilai-nilai demokrasi. Kurikulum yang disusun juga

memuat tujuan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi yang berorientasi nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam pembelajaran IPS diantaranya nilai kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, sikap saling mempercayai, menyelesaikan permasalahan secara damai, toleransi dan berpartisipasi.

Pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Perencanaan pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai demokrasi diawali dengan penyusunan tujuan, materi, metode, media dan evaluasi secara implisit,
- b. Pelaksanaan pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai demokrasi dilaksanakan dengan memilih metode pembelajaran yang mendukung praktik-praktik nilai demokrasi, mengaitkan materi pembelajaran IPS dengan nilai demokrasi, dan memberikan pemahaman berupa contoh penerapan nilai demokrasi di masyarakat,
- c. Evaluasi pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai demokrasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi sikap. Evaluasi sikap dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap sikap siswa dan berpedoman pada lembar penilaian sikap.

Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan pendidikan demokrasi yaitu :

- a. Faktor pendukung meliputi penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, interaksi yang berjalan antar guru dan siswa, guru selalu memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa. Serta kultur sekolah yang mendukung,
- b. Faktor penghambat diantaranya beberapa siswa kurang percaya diri, keseriusan siswa yang rendah, penggunaan media yang terbatas, serta masih adanya tindakan *bullying*.

Nungki Dwi Abshita Rini (2017) dengan judul **“Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul adalah nilai toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, saling menghormati, dan percaya diri. Implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Metode pembelajaran tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya terkait materi yang disampaikan oleh guru. Guru mengajarkan pada siswa untuk bersikap demokratis, sehingga siswa mampu menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupannya sehari-hari.

Faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul yaitu :

- a. Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, gambar, dan buku pelajaran yang digunakan sebagai referensi;
- b. Budaya sekolah, budaya yang dianut di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul menekankan pada kedisiplinan;
- c. Kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah dijadikan panutan karena sekolah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul yaitu :

- a. Kurangnya dukungan orang tua, orang tua yang sibuk menyebabkan anak kurang mendapatkan bimbingan sehingga anak kesulitan dalam belajarnya;
- b. Lingkungan masyarakat, perilaku masyarakat yang negatif dapat memberikan pengaruh buruk untuk pembentukan sikap dan perilaku anak;
- c. Perbedaan individu, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN se-Gugus 3 Patuk Kecamatan Patuk Gunungkidul yaitu :

- a. Kesadaran orang tua, orang tua harus lebih memiliki kesadaran untuk memberikan perhatiannya kepada siswa didalam dan diluar sekolah;
- b. Keterlibatan masyarakat, masyarakat harus dapat menciptakan suasana nyaman dan ikut berperan dalam mengawasi siswa diluar sekolah; dan
- c. Komunikasi yang baik, komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan.

Rini Yuliana (2013) dengan judul **“Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Negeri 3 Gringsing Batang”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang adalah nilai-nilai : Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang telah dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Metode pembelajaran tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeluarkan ide, gagasan, atau pendapat mereka terkait dengan materi yang diberikan guru.

Sejak dini guru mengajarkan pada siswa untuk bersikap demokratis, sehingga siswa mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Disamping itu guru juga memberikan teladan yang baik kepada siswa bagaimana mereka melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, yaitu :

a. Faktor pendorong implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu :

(1) Kurikulum, perubahan kurikulum dengan dimasukkannya pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran berdampak positif bagi pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang,

(2) Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran,

(3) Budaya Sekolah, budaya yang dianut di SMP Negeri 3 Gringsing Batang menekankan pada budaya disiplin, dan

(4) Kepemimpinan, kepemimpinan Kepala SMP Negeri 3 Gringsing Batang dapat dijadikan panutan, mengingat sekolah

sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan, yaitu :

(1) kurangnya dukungan orang tua, orang tua yang sibuk bekerja, menyebabkan anak kurang mendapatkan bimbingan hingga menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam belajarnya,

(2) Lingkungan masyarakat, perilaku masyarakat yang negatif dapat memberi pengaruh buruk bagi pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi seorang siswa,

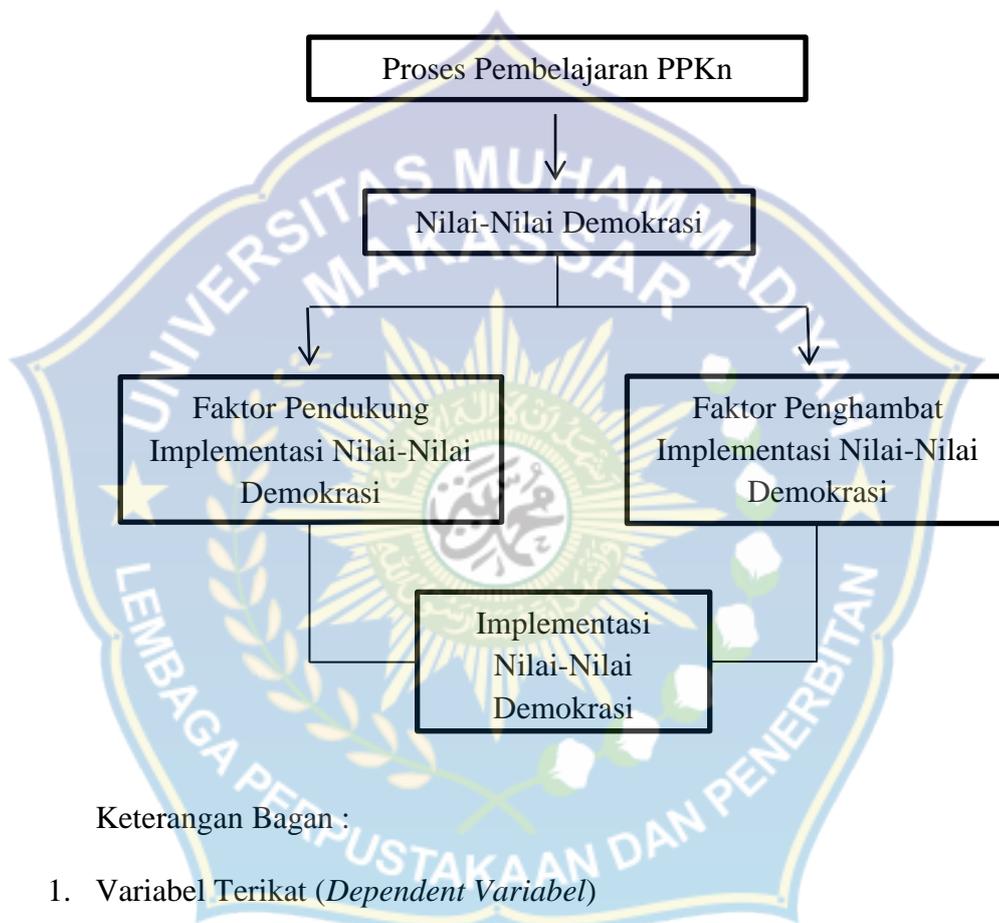
(3) Keterbatasan biaya, biaya masih menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pembelajaran, terkadang guru masih mengeluarkan biaya sendiri untuk menyusun media pembelajaran, dan

(4) Perbedaan individual, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.

B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn. Untuk lebih jelasnya, berikut skema bagan kerangka fikir :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Keterangan Bagan :

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) dalam penelitian ini adalah “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi”. Dalam proses implementasi nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai yang ditanamkan pada siswa yaitu Nilai Kebebasan :

- Kebebasan Berpendapat
- Kebebasan Berkelompok

- Kebebasan Berpartisipasi

2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel Bebas (*Independent Variabel*) dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi.
- b. Faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah "*Faktor Pendukung Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dan Faktor Penghambat Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi*" sebagai variabel bebas dan "*Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi*" sebagai variabel terikat. Adapun definisi operasional variabel yang akan dioperasionalkan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha atau produksi.

Faktor Pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 6 Takalar yaitu :

- a. Sarana dan Prasarana
 - b. Kegiatan Ekstrakurikuler
 - c. Keteladanan Guru
2. Faktor Penghambat adalah halangan atau rintangan tercapainya suatu tujuan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Faktor Penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 6 Takalar yaitu : Perbedaan Individual Siswa.

3. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau realisasi dari sebuah peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pihak tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang ditetapkan.
4. Nilai-Nilai Demokrasi adalah takaran, harga, sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Objek alamiah menurut Sugiyono (2013: 15) adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Takalar yang letaknya di Jl. Hj Manila Dg.Pati, Desa Borong Baji Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 1 Agustus sampai 12 September 2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010: 117), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, XI, dan XII SMA Negeri 6 Takalar yang terdiri dari 23 kelas. Dengan siswa kurang lebih sebanyak 718 orang.

Gambar 3.1 Tabel Populasi

No.	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	X MIPA 1	109	156	265
2	X MIPA 2			
3	X MIPA 3			
4	X MIPA 4			
5	X IPS 1			
6	X IPS 2			
7	X IPS 3			
8	X BAHASA			
9	XI MIPA 1	102	143	245
10	XI MIPA 2			
11	XI MIPA 3			
12	XI IPS 1			
13	XI IPS 2			
14	XI IPS 3			
15	XI IPS 4			
16	XI BAHASA			
17	XII MIPA 1	103	105	208
18	XII MIPA 2			
19	XII MIPA 3			
20	XII MIPA 4			
21	XII IPS 1			
22	XII IPS 2			
23	XII BAHASA			
Jumlah		314	404	718

2. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2013: 300) menjelaskan *purposive sampling* adalah pengambilan data dipilih dengan pertimbangan tertentu, informan dianggap mengetahui mengenai tema penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan sampelnya yaitu kelas X MIPA 1 dengan siswa sebanyak 32 orang.

Gambar 3.2 Tabel Sampel

No.	Kelas	Jenis Kelamin	
		L	P
1	X MIPA 1	8	24
Jumlah		32	

D. Sumber Data

Menurut Sutopo (2006: 56-57), Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Informasi dari kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar. (2) Informasi dari

guru PPKn SMA Negeri 6 Takalar, dan (3) Informasi dari beberapa siswa SMA Negeri 6 Takalar.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah implementasi nilai-nilai demokrasi melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari sekolah yaitu nama-nama siswa dan jumlah siswa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipergunakan dalam menggali data. Dalam penelitian ini data digali dengan instrumen, yaitu : Peneliti terjun kelapangan secara langsung, mengumpulkan data, menganalisis dan membuat kesimpulan dengan alat bantu yang dipakai yaitu : (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara dan (3) dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 224), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket.

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung kepada informan untuk mengetahui : (1) faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi, dan (2) faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi.

Informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala sekolah, Guru PPKn, dan beberapa siswa SMA Negeri 6 Takalar.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung fenomena-fenomena terhadap proses pembelajaran di kelas X MIPA 1 SMA Negeri 6 Takalar terkait “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn”.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengambil gambar terkait “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar”.

Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diteliti dan ditelaah. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa nama-nama siswa dan jumlah siswa.

G. Teknik Analisis Data

Tehnik Analisis data yang di gunakan pada penelitian ada tiga yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Menurut Miles dan Huberman (Suharsimi Arikunto 2010: 337-345) aktivitas analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. *Data reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah data direduksi untuk selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). *Conclution drawing* (verifikasi) adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas secara sistematis dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi wahana pembentukan karakter siswa sehingga siswa memiliki pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, partisipasi dan bertanggung jawab. Untuk itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa.

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk menciptakan kesamaan antara hak dan kewajiban serta kebebasan yang bertanggung jawab. Berdasarkan nilai-nilai inilah sebuah pembelajaran pada mata pelajaran PPKn yang mencakup tentang etika dan moral seseorang dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut wawancara dengan I (Wawancara, 06 September 2018)

selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar menyatakan bahwa:

“Sebagai pendidik saya memiliki visi dan misi untuk dapat membentuk pribadi generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia sehingga dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk tujuan itu saya selalu memotivasi guru-guru yang ada disini untuk lebih kreatif dalam mendesain kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan

secara kondusif serta dapat memberikan contoh dan teladan dalam hal berperilaku yang baik pada siswa”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar selalu mendorong guru selain mencerdaskan siswa juga membentuk kepribadian yang baik dari para siswanya. Pengimplementasian nilai-nilai demokrasi yang diharapkan kepala sekolah kepada guru PPKn selain melalui kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dalam hal ini materi pembelajaran maupun strategi atau metode pembelajaran yang digunakan juga melalui keteladanan yang baik dari perilaku guru itu sendiri.

Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas tentu tidak lepas dari peran guru. Terpenuhinya misi pendidikan sangat tergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan setting demokrasi pada siswa, dengan memberikan kesempatan seluas luasnya pada siswa untuk belajar. Menciptakan suasana yang hangat di sekolah sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar semaksimal mungkin.

Menurut wawancara dengan siswa NA kelas X MIPA 1 (Wawancara, 05 September 2018) menyatakan bahwa:

“Guru PPKn dalam mengajar menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, guru biasanya menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran kemudian melakukan tanya jawab jika semua siswa sudah paham selanjutnya guru memberi tugas yang dimana tugas itu dikerjakan secara individu maupun kelompok”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru PPKn dalam mengajar sering menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pelaksanaan metode pembelajaran tersebut merupakan salah satu wujud dari implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran.

Wawancara dengan siswa IH kelas X MIPA 1 (Wawancara, 05 September 2018) menyatakan bahwa:

“Menurut saya guru PPKn dalam mengajar sudah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, karena guru dalam mengajar bersifat terbuka dan selalu membuka kesempatan yang luas kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang kurang dipahami oleh siswa serta kami diberi kesempatan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang diberikan”.

Kemudian wawancara dengan siswa MS kelas X MIPA 1 (Wawancara, 05 September 2018) menyatakan bahwa:

“Dalam mengajar guru PPKn telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi karena beliau tidak membedakan antara siswa yang pandai dengan yang bodoh, tidak pernah memarahi siswa yang tidak bisa menjawab, selalu menekankan pada siswa untuk menanyakan hal yang belum paham, selalu mendorong siswa untuk berani tampil didepan dengan cara mengacungkan jari sebelum bertanya atau berpendapat”.

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa pembelajaran yang dilaksanakan guru telah berusaha melatih siswa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi pada proses belajar mengajar. Guru PPKn tidak selamanya hanya menjelaskan dalam memberikan materi tetapi juga memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpendapat ataupun bertanya. Dalam pelaksanaan diskusi kelas dan presentasi telah mengandung nilai-

nilai kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berkelompok. Selain itu pula mengandung nilai-nilai tanggung jawab dan kerjasama, guru PPKn disini dalam mengajar juga santai, hal ini berarti tidak terdapat unsur-unsur paksaan atau otoriter dalam proses belajar mengajar dikelas sehingga dapat dikatakan bahwa guru PPKn telah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam proses belajar mengajar dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan adapun nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada siswa dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar yaitu nilai kebebasan.

Nilai kebebasan yang ditanamkan ada tiga yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok dan kebebasan berpartisipasi.

a. Kebebasan Berpendapat

Nilai kebebasan dalam proses pembelajaran mutlak diperlukan karena sudah menjadi kebutuhan setiap individu (siswa) untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat dalam pembelajaran. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu ciri dari nilai-nilai demokrasi. Keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat harus dilatih sejak dini agar mereka memahami bagaimana cara yang benar untuk mencari mufakat dalam sebuah demokrasi. Disamping itu, keberanian menyampaikan pendapat hendaknya juga di apresiasi dengan baik, artinya jika pendapat kurang sesuai maka sudah menjadi tugas

seorang guru untuk meluruskan bukan langsung menyalahkan pendapat tersebut. Agar siswa menjadi lebih percaya diri.

Dalam proses pembelajaran, guru PPkn selalu memberikan kebebasan untuk bertanya apabila ada peserta didik yang kurang jelas dengan materi yang disampaikan. Selain itu, dalam pembelajaran PPkn juga diadakan diskusi kelas yang mengandung nilai kebebasan, dalam diskusi kelas biasanya terdapat perdebatan antar siswa, guru Pkn sifatnya menengahi dan menetralsir keadaan tersebut. Dengan adanya kebebasan untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat, maka peserta didik akan lebih terbuka dan merasa percaya diri.

b. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok dan berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin pesat.

Kebebasan berkelompok di sekolah juga dapat dengan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR, dan pramuka.

c. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi merupakan hak setiap siswa. Partisipasi setiap siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin.

Di SMA Negeri 6 Takalar didalam maupun diluar proses pembelajaran siswa selalu diberi kebebasan untuk berpartisipasi. Dalam proses pembelajaran contohnya dalam diskusi kelompok siswa yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain maka siswa lain diperbolehkan untuk membantu menjawab. Sedangkan diluar proses pembelajaran seluruh siswa dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS.

Menurut wawancara dengan siswa NA kelas X MIPA 1 (Wawancara, 05 September 2018) menyatakan bahwa:

“Ya, dalam pemilihan ketua OSIS dan kegiatan-kegiatan lain seperti perlombaan antar sekolah seluruh siswa dilibatkan, siapa-siapa yang ingin berpartisipasi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa seluruh siswa memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan sekolah baik itu pemilihan ketua OSIS maupun perlombaan-perlombaan didalam maupun diluar sekolah.

Adapun pengimplementasian nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri

6 Takalar pada setiap sila pancasila yaitu :

- a. Ketuhanan yang maha Esa yaitu apabila ada siswa yang berbeda agama atau keyakinan mereka tidak saling mengejek melainkan mereka saling menghargai dan melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, pada pembelajaran agama islam siswa yang berbeda agama diberi kebebasan apakah ingin ikut pada proses pembelajaran ataukah tidak. Namun jika siswa tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran maka siswa tersebut juga tidak diisinkan berkeliaran melainkan diberi tugas dan mengerjakannya di perpustakaan.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu apabila ada teman yang sedang dalam kesusahan misal sedang sakit atau terkena musibah maka siswa lain selalu membantu mengumpulkan dana untuk kemudian disumbangkan pada siswa yang sedang sakit atau terkena musibah, kegiatan mengumpulkan dana itu selalu dilakukan oleh para anggota OSIS setiap ada siswa yang sedang sakit atau terkena musibah.
- c. Persatuan indonesia yaitu para siswa selalu bersatu dan bekerja sama dengan teman kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, tak hanya dalam proses pembelajaran dikelas mereka juga selalu bersatu dan bekerja sama apabila ada perlombaan antar kelas ataupun antar sekolah agar mendapat juara.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu apabila ada permasalahan yang dihadapi siswa maka diselesaikan dengan cara musyawarah termasuk apabila ada siswa yang nilainya bermasalah, guru selalu meminta pendapat dari siswa lain mengenai penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Wawancara IM (Wawancara, 01 September 2018) selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa:

“Mulai dari pembelajaran hingga penilaian dilakukan secara demokrasi contoh jika ada siswa yang nilainya bermasalah saya selalu mendiskusikan dengan teman-temannya”.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu dalam proses pembelajaran di kelas guru tidak pernah membedakan antara siswa yang satu dengan lain yang bodoh maupun pintar mereka diberi kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat.

2. Faktor Pendukung Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar

Dalam mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar tentunya ada yang menjadi pendukung dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa diantaranya sarana dan prasarana. Menurut KBBI (2002) sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai

sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan, dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb).

Menurut wawancara dengan I (Wawancara, 06 September 2018)

selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar menyatakan bahwa:

“Keberhasilan sebuah pendidikan atau pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Untuk itu saya selalu memfasilitasi guru dengan sarana dan prasarana yang memadai agar mempermudah proses pembelajaran”.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara IM (Wawancara, 01 September 2018) selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa:

“Dalam proses pembelajaran saya selalu menggunakan media pembelajaran seperti LCD, leptop, LKS dan beberapa buku referensi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai guru dapat lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sarana pendukung yang dimanfaatkan guru dalam proses belajar mengajar seperti LCD, Laptop, LKS dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Siswa juga tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran, karena guru tidak monoton dalam menyampaikan materi.

Tidak hanya sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa tetapi juga ada

kegiatan yang menjadi pendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Tri Ani Hastuti (2008: 63) ekstrakurikuler merupakan program sekolah, berupa kegiatan siswa, optimasi pelajaran terkait, menyalurkan bakat dan minat, kemampuan dan keterampilan untuk memantapkan kepribadian siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut memperoleh manfaat dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kegiatan yang diikuti.

Menurut wawancara dengan I (Wawancara, 06 September 2018) selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Takalar menyatakan bahwa:

“Tidak hanya sarana dan prasarana yang menjadi pendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa melainkan disekolah ini juga disediakan banyak kelompok kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR dan Pramuka, dan siswa diberi kebebasan untuk memilih kegiatan mana yang ingin mereka ikuti sebab mereka memiliki hak untuk memilih”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya banyak kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh pihak sekolah diharapkan siswa mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi pendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar yaitu OSIS, PMR, dan Pramuka. Dimana siswa diberi kebebasan untuk memilih aktif dan berpartisipasi pada kegiatan apa. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut siswa juga dilatih untuk saling bekerja sama dalam pembentukan kegiatan serta acara yang diadakan agar berjalan lancar dan sukses.

Selain sarana dan prasarana dan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah faktor lain yang mendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa yaitu keteladanan guru.

Wawancara IM (Wawancara, 01 September 2018) selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa:

“Dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa saya sendiri sebagai teladan bagi siswa yaitu dengan memperlihatkan langsung pada siswa contoh-contoh demokrasi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar guru sendiri sebagai teladan bagi siswanya dimana guru memperlihatkan secara langsung pada siswa contoh penerapan nilai-nilai demokrasi pada siswa agar siswa lebih gampang untuk memahami. Guru juga menggunakan pendekatan khusus dalam pembelajaran yaitu pendekatan vaktual dimana guru selalu menghubungkan materi pada kondisi riil atau nyata.

3. Faktor Penghambat Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar

Dalam mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar ini tentunya terdapat kendala yang dialami oleh guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu kendala Perbedaan individual.

Masing-masing siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya perbedaan ini menuntut adanya perbedaan perlakuan antara siswa yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini seorang guru harus mampu membuat strategi pembelajaran terutama dalam hal pemilihan metode yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam belajar.

Menurut wawancara dengan IM (Wawancara, 01 September 2018) selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu perbedaan individual dimana setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi, namun ada juga sebagian siswa yang memang agak lambat, ada siswa yang mau di atur dan ada pula yang susah diatur”.

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa perbedaan individual siswa sangat berpengaruh pada proses pembelajaran dan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun dengan demikian, guru hendaknya dapat menyasiasi kondisi ini dengan menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Pembahasan

Pendidikan merupakan sarana dan alat yang dapat digunakan untuk mengalihkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Pendidikan diharapkan dapat membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam

kehidupan. Oleh sebab itu pendidikan diharapkan mengarah pada pandangan dan praktek yang membangun ruang pembelajaran dan dapat memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keberadaban.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada siswa di SMA Negeri 6 Takalar diantaranya yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, dan kebebasan berpartisipasi.

Kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi dan kebebasan berpartisipasi merupakan aspek yang terkandung dalam demokrasi. Selama proses pembelajaran, guru berusaha menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang biasa tetapi perbedaan pendapat itu harus diutarakan dengan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Aspek lain yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah kerjasama, kebebasan berkelompok dan kepercayaan diri. Metode pembelajaran yang dipilih guru diupayakan agar siswa mampu bekerjasama secara baik dengan rekan-rekannya secara berkelompok. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kelompoknya, namun terkadang guru sendiri yang membagi siswa ke dalam kelompok diskusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan ini

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan tempat bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan dan potensi pada diri siswa sehingga siswa dapat menjadi manusia yang berkarakter.. Hal tersebut dapat memposisikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentukan karakter.

Pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki kepribadian yang kuat di tengah-tengah konflik peradaban.

Sekolah merupakan sebuah organisasi yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan ketrampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial. Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas dimasyarakat.

Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, misalnya siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan kelas, kenyamanan kelas, dan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi iklim pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran apapun. Interaksi guru dan siswa bukan sebagai subjek-objek, melainkan subjek-subjek yang sama-sama membangun karakter dan jati diri.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mendukung implementasi nilai-nilai demokrasi di sekolah diantaranya Sarana dan Prasarana. Guru lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru di SMA Negeri 6 Takalar dalam proses belajar mengajar seperti LCD, Laptop, beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran, karena guru tidak monoton dalam menyampaikan materi.

Sedangkan faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi antara lain Perbedaan individual. Perbedaan kemampuan antar siswa menjadi

sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada siswa yang memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi, namun ada juga sebagian siswa yang memang agak lambat ada siswa yang mau di atur dan ada pula yang susah diatur. Namun dengan demikian, guru hendaknya dapat menyiasati kondisi ini dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan yaitu nilai kebebasan : kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, dan kebebasan berpartisipasi. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeluarkan ide, gagasan, atau pendapat mereka terkait dengan materi yang diberikan guru. Sejak dini guru mengajarkan pada siswa untuk bersikap demokratis, sehingga siswa mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Faktor pendukung pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar yaitu : (1) Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, LKS dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran, (2) Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu OSIS, PMR dan Pramuka dimana siswa diberi kebebasan untuk memilih aktif dan berpartisipasi pada kegiatan mana yang mereka inginkan dan menjadi pendorong kerja sama siswa dengan siswa lain,

dan (3) Keteladanan Guru, guru memperlihatkan secara langsung pada siswa contoh penerapan nilai-nilai demokrasi.

Faktor penghambat pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar yaitu : Perbedaan individual siswa, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi guru dan sekolah

Guru PPKn selama pembelajaran perlu mendorong siswa yang belum aktif untuk berpartisipasi dalam kerja kelompok maupun diskusi kelompok agar menumbuhkan keberanian siswa untuk berani tampil didepan. Sedangkan untuk pihak sekolah disarankan untuk dapat mengembangkan lagi proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa.

2. Bagi siswa

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis atau di dalam khasanah bahasa Indonesia disebut masyarakat madani (*civil society*) adalah suatu masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri dengan mengakui akan

perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya. Untuk itu diharapkan bagi seluruh siswa sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih memahami mengenai demokrasi dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Baso, Nasrun Hasan. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Makassar: Media Sembilansembilan.
- Azyumardi Azra. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Azyumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ibid., 110-111.
- Berti Damayanti. 2016. *Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Mata Pelajaran IPS Di SMP Diponegoro Majenang Cilacap*.
- Choirul Mahfud. 2010. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George R. Knight. 2007. *Filsafat Pendidikan*. Mahmud Arif. Terjemahan. Yogyakarta: Gama Media.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku pintar calon anggota dan anggota legislatif, DPR, DPRD, dan DPD*. Tangerang: Visimedia. (Online), (http://www.scribd.com/mobile/doc/249106551/Jenis-Jenis-Demokrasi#close_user_settings_menu, diakses 1 Februari 2018).
- Haedar Nashir. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.A.R. Tilaar. 2004. *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- H.A.R. Tilaar. 2012. *Kalaedoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Haryanto Al-Fandi. 2011. *Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasbullah. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hujair AH Sanaky. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Kosasih Djahiri. 2006. *Pengajaran Studi Sosial / IPS (Dasar-Dasar Pengertian, Metodologi, Model Belajar-Mengajar IPS)*. LPPIPS FKIPS IKIP. Bandung.
- Lincoln, A. 2003. *Pengertian Demokrasi*. Di akses di (<http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurutpara-ahli.html>)
- M. Agus Nuryatno. 2011. *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Miriam Budiarto. 1980. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- M. Taupan. 1989. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muklasin. 2013. *Demokrasi Pendidikan dalam Kerangka Pendidikan Nasional (Telaah Pemikiran H.A.R. Tilaar)*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Nungki Dwi Abshita Rini. 2017. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Priyanto, Sugeng, At. 2005. *Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)*. Semarang: FIS UNNES.
- Rini Yuliana. 2013. *Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Rulam Ahmadi. 2016. *Pengantar Pendidikan; Asas dan Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sevilla dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Soegito, A.T. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunarso, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Syamsul Arifin, Ahmad Barizi. 2001. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis Dan Demokrasi*. Malang: UMM Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tim Abdi Guru. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VII*. Erlangga: Jakarta.
- Tonny D. Widiastomo. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tri Ani Hastuti. 2008. *Kontribusi Ekstrakurikuler Bolabasket Terhadap Pembibitan Atlet dan Peningkatan Kesegaran Jasmani*. Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia. Jurusan Pendidikan Olahraga. Fakultas Ilmu Keolahragaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Widiastono, D. Tonny. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Winarno. 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publiishing.

<https://guruppkn.com/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan-menurut-para-ahli/amp> (Online) diakses 27/01/18.

<http://hudianime.blogspot.co.id/2016/09/kurikulum-ppkn-2006-2013.html?m=1>
(Online) diakses 11/05/18 pukul 10:00.

<https://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai-html> (Online) diakses
28/04/19 pukul 12:20.





SKRIPSI

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1)
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA

Lembar Instrumen Wawancara Kepala Sekolah

Nama :

Jabatan :

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1	Bagaimana menurut anda mengenai pendidikan demokrasi ?	
2	Apakah di sekolah ini diterapkan pendidikan demokrasi ? Jika iya, apakah sudah berjalan dengan baik ?	
3	Kegiatan demokrasi seperti apakah yang sering dilakukan di sekolah ini dan apakah seluruh siswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut ?	
4	Pada kegiatan tersebut nilai-nilai demokrasi apakah yang ditanamkan pada siswa?	
5	Sebagai kepala sekolah bagaimana peran dan upaya anda dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	
6	Dalam mencapai suatu keberhasilan dari suatu tujuan tentunya ada faktor yang menjadi pendukung, untuk itu faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah ini ?	
7	Selain itu apakah ada faktor pendukung lain ?	

8	Keberhasilan dari suatu tujuan tentunya tidak terlepas dari adanya kendala atau penghambat, oleh karena itu apakah yang menjadi faktor penghambat dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di sekolah ini ?	
---	--	--



Lembar Instrumen Wawancara Guru PPKn

Nama :

Jabatan :

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1	Apakah di sekolah ini pendidikan demokrasi terimplementasikan dengan baik ?	
2	Sebagai guru PPKn bagaimana upaya yang anda lakukan dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	
3	Selain itu apakah ada upaya lain ?	
4	Apakah ada media pembelajaran yang menjadi penunjang dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	
5	Apakah anda menggunakan pendekatan khusus dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?	
6	Apakah terdapat kendala atau penghambat dalam proses implementasi pendidikan demokrasi pada pembelajaran PPKn ?	

Lembar Instrumen Wawancara Siswa

Nama :

Kelas :

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1	Dik, kamu tau tidak apa itu demokrasi ?	
2	Bisa tidak kamu beri satu contoh kegiatan demokrasi yang biasa dilakukan di sekolah ini ?	
3	Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ?	
4	Bagaimanakah proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok ?	
5	Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?	
6	Metode pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn ?	
7	Apakah ada kendala kalian dalam proses pembelajaran PPKn ?	

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis/06 September 2018
Waktu : Pukul 10.03 AM
Tempat : Ruang Kepala Sekolah

Identitas Informan

Nama Lengkap : Ilham S.Pd.,M.Pd.
Jenis Kelamin/Umur : Laki-Laki/48 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2
Mulai Mengajar Sejak : -
Jabatan : Kepala Sekolah

1. Bagaimana menurut anda mengenai pendidikan demokrasi ?

Jawab : Menurut saya pendidikan demokrasi adalah suatu proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa agar peserta didik memahami dan terbiasa hidup berdemokrasi.

2. Apakah di sekolah ini diterapkan pendidikan demokrasi ? Jika iya, apakah sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Iya di sekolah ini diterapkan pendidikan demokrasi dan sudah berjalan dengan baik, baik teori maupun praktek.

3. Kegiatan demokrasi seperti apakah yang sering dilakukan di sekolah ini dan apakah seluruh siswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut ?

Jawab : Kegiatan demokrasi yang sering dilakukan di sekolah ini yaitu pemilihan ketua OSIS, ketua PMR dan ketua Pramuka. Ya, seluruh siswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebab mereka memiliki hak untuk memilih.

4. Pada kegiatan tersebut nilai-nilai demokrasi apakah yang ditanamkan pada siswa?

Jawab : Pada kegiatan tersebut nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada siswa yaitu nilai kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok dan kebebasan berpartisipasi.

5. Sebagai kepala sekolah bagaimana peran dan upaya anda dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?

Jawab : Sebagai pendidik saya memiliki visi dan misi untuk dapat membentuk pribadi generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia sehingga dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk tujuan itu saya selalu memotivasi guru-guru yang ada disini untuk lebih kreatif dalam mendesain kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara kondusif serta dapat memberikan contoh dan teladan dalam hal berperilaku yang baik pada siswa.

6. Dalam mencapai suatu keberhasilan dari suatu tujuan tentunya ada faktor yang menjadi pendukung, untuk itu faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah ini ?

Jawab : Keberhasilan sebuah pendidikan atau pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Untuk itu saya selalu memfasilitasi guru dengan sarana dan prasarana yang memadai agar mempermudah proses pembelajaran.

7. Selain itu apakah ada faktor pendukung lain ?

Jawab : Ya, Tidak hanya sarana dan prasarana yang menjadi pendukung proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa melainkan disekolah ini juga disediakan banyak kelompok kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR dan Pramuka, dan siswa diberi kebebasan untuk memilih kegiatan mana yang ingin mereka ikuti sebab mereka memiliki hak untuk memilih.

8. Keberhaslan dari suatu tujuan tentunya tidak terlepas dari adanya kendala atau penghambat, oleh karena itu apakah yang menjadi faktor penghambat dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa di sekolah ini ?

Jawab : Adanya perbedaan individual siswa yaitu terkadang ada siswa yang susah untuk diatur. Namun, pada umumnya tidak ada kendala dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa.



TRANSKRIP WAWANCARA GURU PKN

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu/01 September 2018

Waktu : Pukul 12.36 PM

Tempat : Ruang Guru

Identitas Informan

Nama Lengkap : Irma M. S.Pd.

Jenis Kelamin/Umur : Perempuan/43 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Mulai Mengajar Sejak : -

Jabatan : Guru PPKn/Staf Kurikulum

1. Apakah di sekolah ini pendidikan demokrasi terimplementasikan dengan baik ?

Jawab : Ya, di sekolah ini pendidikan demokrasi terimplementasikan dengan baik.

2. Sebagai guru PPKn bagaimana upaya yang anda lakukan dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?

Jawab : Dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa upaya yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yaitu melalui diskusi kelompok.

3. Selain itu apakah ada upaya lain ?

Jawab : Mulai dari pembelajaran hingga penilaian dilakukan secara demokrasi contoh jika ada siswa yang nilainya bermasalah saya selalu mendiskusikan dengan teman-temannya.

4. Apakah ada media pembelajaran yang menjadi penunjang dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?

Jawab : Dalam proses pembelajaran saya selalu menggunakan media pembelajaran seperti LCD, leptop, LKS dan beberapa buku referensi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran.

5. Apakah anda menggunakan pendekatan khusus dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?

Jawab : Dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa saya sendiri sebagai teladan bagi siswa yaitu dengan memperlihatkan langsung pada siswa contoh-contoh demokrasi.

6. Apakah terdapat kendala atau penghambat dalam proses implementasi pendidikan demokrasi pada pembelajaran PPKn ?

Jawab : Faktor penghambat implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu perbedaan individual dimana setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi, namun ada juga sebagian siswa yang memang agak lambat, ada siswa yang mau di atur dan ada pula yang susah diatur.

TRANSKRIP WAWANCARA SISWA

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa/04 September 2018

Waktu : Pukul 12.15 PM

Tempat : Mushollah

Identitas Informan

Nama Lengkap : Mardiana Siregar

Kelas : X MIPA 1

1. Dik, kamu tau tidak apa itu demokrasi ?

Jawab : Ya tau, menurut saya demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

2. Bisa tidak kamu beri satu contoh kegiatan demokrasi yang biasa dilakukan di sekolah ini ?

Jawab : Kegiatan demokrasi yang sering dilakukan di sekolah ini yaitu pemilihan ketua OSIS.

3. Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ?

Jawab : Ya, dalam setiap kegiatan seluruh siswa selalu dilibatkan karena sekolah merupakan tempat mendidik anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang maka dari itu seluruh siswa perlu memahami dan membiasakan hidup berdemokratis.

4. Bagaimanakah proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok ?

Jawab : Proses pembelajaran di kelas saya guru biasanya menjelaskan terlebih dahulu setelah menjelaskan dan seluruh siswa sudah paham kemudian guru memberi tugas yang dikerjakan secara berkelompok dan kadang perindividu, ya di kelas saya sering belajar secara berkelompok karena dengan belajar berkelompok akan memudahkan menyelesaikan setiap persoalan apabila diselesaikan secara bersama-sama.

5. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawab : Dalam mengajar guru PPKn telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi karena beliau tidak membeda-bedakan antara siswa yang pandai dengan yang bodoh, tidak pernah memarahi siswa yang tidak bisa menjawab, selalu menekankan pada siswa untuk menanyakan hal yang belum paham, selalu mendorong siswa untuk berani tampil di depan dengan cara mengacungkan jari sebelum bertanya atau berpendapat.

6. Metode pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn ?

Jawab : Metode pembelajaran yang sering guru gunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan.

7. Apakah ada kendala kalian dalam proses pembelajaran PPKn ?

Jawab : Selama saya belajar PPKn saya tidak pernah mengalami kendala apapun.

TRANSKRIP WAWANCARA SISWA

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu/05 September 2018

Waktu : Pukul 10.05 AM

Tempat : Kelas X MIPA 1

Identitas Informan

Nama Lengkap : Nur Aulia Inayah

Kelas : X MIPA 1

1. Dik, kamu tau tidak apa itu demokrasi ?

Jawab : Tau, demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang semua rakyatnya turut memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya.

2. Bisa tidak kamu beri satu contoh kegiatan demokrasi yang biasa dilakukan di sekolah ini ?

Jawab : Contohnya seperti pemilihan ketua OSIS.

3. Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ?

Jawab : Ya, dalam pemilihan ketua OSIS dan kegiatan-kegiatan lain seperti perlombaan antar sekolah seluruh siswa dilibatkan, siapa-siapa yang ingin berpartisipasi.

4. Bagaimanakah proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok ?

Jawab : Proses pembelajaran PPKn di kelas saya biasanya guru lebih sering menjelaskan didepan kemudian diberi tugas yang kadang dikerjakan secara berkelompok kadang pula dikerjakan perindividu.

5. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawab : Menurut saya guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran karena guru tidak pernah membedakan antara siswa yang satu dengan yang lain serta guru selalu memberi kebebasan kepada setiap siswa untuk bertanya maupun mengeluarkan pendapat.

6. Metode pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn ?

Jawab : Guru PPKn dalam mengajar menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, guru biasanya menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran kemudian melakukan tanya jawab jika semua siswa sudah paham selanjutnya guru memberi tugas yang dimana tugas itu dikerjakan secara individu maupun kelompok.

7. Apakah ada kendala kalian dalam proses pembelajaran PPKn ?

Jawab : Kalau saya pribadi tidak ada kendala dalam proses pembelajaran PPKn karena guru memberi kebebasan kepada setiap siswa untuk mencari jawaban atau materi dari berbagai sumber.

TRANSKRIP WAWANCARA SISWA

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu/05 September 2018

Waktu : Pukul 12.07 PM

Tempat : Perpustakaan

Identitas Informan

Nama Lengkap : Ichlasul Haq Andi Mallawa

Kelas : X MIPA 1

1. Dik, kamu tau tidak apa itu demokrasi ?

Jawab : Ya tau, menurut saya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

2. Bisa tidak kamu beri satu contoh kegiatan demokrasi yang biasa dilakukan di sekolah ini ?

Jawab : Contohnya seperti pemilihan ketua OSIS.

3. Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ?

Jawab : Ya, seluruh siswa selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan baik itu kegiatan di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS seluruh siswa wajib untuk berpartisipasi begitupun apabila ada kegiatan diluar sekolah seluruh siswa selalu diberi kebebasan untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan.

4. Bagaimanakah proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok ?

Jawab : Proses pembelajaran PPKn di kelas saya biasanya guru menjelaskan materi terlebih dahulu kemudian memberi tugas jika siswa sudah memahami materi. Ya kami sering belajar secara berkelompok karena setiap tugas yang diberikan oleh guru selalu dikerjakan secara berkelompok agar kami lebih mudah menyelesaikannya.

5. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawab : Menurut saya guru PPKn dalam mengajar sudah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, karena guru dalam mengajar bersifat terbuka dan selalu membuka kesempatan yang luas kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang kurang dipahami oleh siswa serta kami diberi kesempatan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang diberikan.

6. Metode pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn ?

Jawab : Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran bervariasi seperti metode ceramah guru terlebih dahulu menjelaskan materi kemudian metode tanya jawab yaitu siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang kurang dipahami jika tidak ada yang mau bertanya maka sebaliknya guru yang bertanya kepada siswa jika seluruh siswa sudah paham selanjutnya guru memberi tugas yang dikerjakan secara berkelompok.

7. Apakah ada kendala kalian dalam proses pembelajaran PPKn ?

Jawab : Selama saya belajar PPKn saya tidak mengalami kendala apapun.

BIODATA INFORMAN

1. Nama : Ilham S.pd.,M.Pd. (I)
TTL : Takalar, 08 April 1970
Alamat : Desa Sanrobone, Kab. Takalar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2 UNM
Mulai Mengajar Sejak : -
Jabatan : Kepala Sekolah
 2. Nama : Irma M S.Pd. (IM)
TTL : Borongtala, 05 Oktober 1974
Alamat : Borongtala Kec. Bontonompo, Kab. Gowa
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 UNM
Mulai Mengajar Sejak : -
Jabatan : Guru Bidang Studi PPKn
 3. Nama : Mardiana Siregar (MS)
Kelas : X MIPA I
 4. Nama : Nur Aulia Inayah (NA)
Kelas : X MIPA I
 5. Nama : Ichlasul Haq Andi Mallawa (IH)
Kelas : X MIPA I
- 

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI MELALUI MATA PELAJARAN PPKn di SMA NEGERI 6 TAKALAR

Lembar Observasi Guru

Nama Guru :

Mata Pelajaran :

Kelas :

Hari/Tanggal :

No.	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk bertanya		
2	Guru memberi kebebasan kepada setiap siswa untuk mengeluarkan pendapatnya		
3	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan		
4	Guru memberi kebebasan kepada seluruh anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam diskusi		
5	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk membentuk kelompok sendiri		
6	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk mencari materi dari berbagai sumber		
7	Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berfikir sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan		

Lembar Observasi Siswa

Mata Pelajaran :

Kelas :

Hari/Tanggal :

No.	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya		
2	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya		
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok		
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain		
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi		
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya		
7	Siswa menghargai pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya		



LAMPIRAN 4

DATA HASIL OBSERVASI GURU

Nama Guru : Irma M S.Pd.

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas : X MIPA 1

Hari/Tanggal : Senin, 13 Agustus 2018

No.	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk bertanya	√	
2	Guru memberi kebebasan kepada setiap siswa untuk mengeluarkan pendapatnya	√	
3	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan	√	
4	Guru memberi kebebasan kepada seluruh anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam diskusi	√	
5	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk membentuk kelompok sendiri	√	
6	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk mencari materi dari berbagai sumber	√	
7	Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berfikir sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan	√	

DATA HASIL OBSERVASI SISWA

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas : X MIPA 1

Hari/Tanggal : Senin, 27 Agustus 2018

No.	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	√	
2	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	√	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	√	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	√	
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi	√	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya	√	
7	Siswa menghargai pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	√	



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kegiatan Diskusi Kelompok Siswa



Gambar 2. Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Takalar



Gambar 3. Wawancara Dengan Guru PPKn SMA Negeri 6 Takalar



Gambar 4. Wawancara Dengan Siswa SMA Negeri 6 Takalar

LAMPIRAN 6

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN
PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurcahya Ana S	Pembimbing I : Dr. Andi Sugiaty M.Pd.
NIM : 10543008614	NIDN : 00180519
Program Studi : PPKn	

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing
1.	Selasa 20/09/2018	Publisa Pasar 1. U. U.	
2.	Juni 02-02-2018	Publisa PABU Tanjung Pura Meneri 1789 a K/3	
3.	Sabtu 1/2/2018	Ke... Propena	
4.			
5.			

Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuai dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan.

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN
PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nurcahya Ana S	Pembimbing II : Dra. Jumiati Nur., M.Pd.
NIM : 10543008614	NIDN : 638377 0908066702
Program Studi : PPKn	

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing
1.	17 Februari 2018	Bab I, Letak kelengkapan rumusan masalah & penulisan Bab II, Kejelasan flow bagan	<i>JR</i>
2.	3 Mei 2018	— penulisan Kutipan dan Daftar pustaka	<i>JR</i>
3.	4 Mei 2018	ACC	<i>JR</i>
4.			
5.			

Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuai dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan.

LAMPIRAN 7

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurcahya Ana S	Pembimbing I : Dr. Andi Sugiati M.Pd.
NIM : 10543008614	NIDN : 00180519
Program Studi : PPKn	

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing
1.	14/9 2018	Perbaik. Bab II Definisi operasional dan Bab IV	
2.	18/9 2018	Perbaik. Bab IV	
3.	20/09 2018	Kee.	
4.			
5.			

Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan.

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurcahya Ana S	Pembimbing II : Dra. Jumiati Nur., M.Pd.
NIM : 10543008614	NIDN : 0908066702
Program Studi : PPKn	

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing
1.	12 September 2018	bab V - lebih diperjelas pk implementasi pemb. PPKn	
2.	15 September 2018	Abstrak	
3.	17 September 2018		
4.			
5.			

Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan.

LAMPIRAN 8

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 6 Takalar
Nama Mahasiswa : Nurcahya Ana S
NIM : 10543008614
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II


Dr. Andi Sugiati M.Pd.
NIDN. 00180519


Dra. Jumiati Nur., M.Pd.
NIDN. 0908066702

Mengetahui,

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn
FKIP Unismuh Makassar


Erwin Andi M. Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Muhajir S. Pd., M.Pd.
NBM. 988 461

LAMPIRAN 9



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari iniKamis..... Tanggal ..7..Ramadhan..1439..H bertepatan tanggal ..24/5.....2018...M bertempat diruang ujian Fkip..... kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :

Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui mata pelajaran PPKn Di SMA Negeri 6 Takalat

Dari Mahasiswa :

Nama : Nurchayya Ana S
Stambuk/NIM : 105.93.0026.19
Jurusan : PPKn
Moderator : Drs. H. Murdin, M. Pd
Hasil Seminar :
Alamat/Telp :

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Disetujui

Penanggung I : Dra. Jumiaty Nur, M. Pd ([Signature])

Penanggung II : Drs. H. Murdin, M. Pd ([Signature])

Penanggung III : Dra. Hj. Syahrubulan, K. M. Pd ([Signature])

Penanggung IV : Dr. Andi Sigiaty, M. Pd ([Signature])

Makassar,20...

Ketua Jurusan

([Signature])
Dr. Mubayir, M. Pd

LAMPIRAN 10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 ☎ (0411) 860 837 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.org>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KETERANGAN PERBAIKAN HASIL UJIAN PROPOSAL

Berdasarkan Hasil Ujian :

Nama : NURCAHYA ANA . S
Stambuk : 10843008614
Program Studi : PPKn
Judul : Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui
Mata Pelajaran PPKn DI SMA NEGERI 6
Takalar

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

No	Tim Penguji	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dra. Jumiati Nur, M Pd	31 Mei 2018	
2	Drs. H. Nurdin, M. Pd	06-06-2018	
3	Dra. Hj. Syahribulan K.M Pd	07-06-2018	
4	Dr. Andi Sugianti, M. Pd	05-06-2018	

1438 H

Makassar ,

2017 M

Ketua Prodi,

Dr. Muhaqir, M. Pd

LAMPIRAN 11



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9168/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1259/ln-5/C.4-VIII/VI/37/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURCAHYA ANA S**
Nomor Pokok : 10543008514
Program Studi : PPKn
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI MATA PELAJARAN PPKN DI SMA NEGERI 6 TAKALAR"

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. **01 Agustus s/d 30 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prihalnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tambahan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringgal.



LAMPIRAN 12



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar Telepon 585257, 586083, Fax 584959 Kode Pos. 90245

Makassar, 13 Juli 2018

Nomor : 867/763/P.PTK-FAS/DISDIK Kepada
Lampiran : Yth. Kepala SMA NEGERI 6 Takalar
Perihal : Izin Penelitian di Takalar

Dengan hormat, berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No. 9168/S.01/PTSP/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Izin Penelitian oleh Mahasiswa Tersebut dibawah ini :

Nama : NURCAHAYA ANA S
Nomor Pokok : 10543008614
Progran Studi : PPKN
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa (SI)
Alamat : Jl.Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan penelitian di SMA NEGERI 6 Takalar dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI MATA PELAJARAN PPKN DI SMA NEGERI 9 TAKALAR "

Pelaksanaan : 01 Agustus s/d 30 September 2018

Pada Prinsipnya kami menerima dan menyetujui kegiatan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**dan KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPALA BIDANG PPTK FASILITASI PAUD
DIKDAS, DIKTI DAN DIKMAS**

MELVIN SALAHUDDIN, SE, M.Pub.& Int.Law.Ph.D.

Pangkat: Penata Tk. I

NIP: 19750120 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Takalar-Jeneponto
3. Pertinggal

LAMPIRAN 13



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 6 TAKALAR
Alamat: Jln. Hj. Manila Dg. Pati, Malowang, Kab. Takalar. Telp. (0418) 323832



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO.229/DISDIK/SMA.06/TU/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT SMA Negeri 6 Takalar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar Propinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : **NURCAHYA ANA S**
Tempat & Tgl. Lahir : Panjarungan, 10 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/ Fakultas : Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan/Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan UNISMUH Makassar
NIM : 10543008614
Alamat : Panjarungan Kel. Panrannuangku Kec. Polut Kab.
Takalar

Benar telah mengadakan penelitian pada SMA Negeri 6 Takalar dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul :

" IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI MATA PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 6 TAKALAR "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 12 September 2018
Kepala UPT SMAN 6 Takalar,



H.HAM, S.Pd, M.Pd
Pangreh Pembina Tk. 1
NIP. 19700408 199512 1 008

RIWAYAT HIDUP



Nurcahya Ana S. Dilahirkan di Panjarungan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Mei 1997, dari pasangan Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda Marhasni. Penulis masuk Sekolah TK pada tahun 2001 di TK Amanah Palleko dan tamat pada tahun 2002, kemudian masuk SD di SDN No.217 Inpres Panjarungan dan tamat tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara dan tamat tahun 2011, setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Takalar Ex SMA Negeri 1 Polongbangkeng Utara dan tamat tahun 2014. Pada tahun yang sama (2014), penulis melanjutkan pendidikan pada Program Strata 1 (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.